

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KOTA KUPANG

Revi Halim^{1*}, Alfred T. Rantelobo²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: ReviHalim@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the City of Kupang in 2015-2018. This research is a quantitative descriptive. This research was conducted at the Regional Finance Agency of Kupang City. Data collection is done by using the documentation method. The data analysis technique used is quantitative descriptive with the formula: Decentralized Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Revenue Growth Ratio, Spending Efficiency Ratio, Spending Variance Ratio, Spending Growth Ratio. The analysis of the results of this study shows that the Regional Financial Performance of the City of Kupang can be seen from (1) Decentralization Degree Ratio can be categorized as less, because the average degree of decentralization is 15.79%, (2) Regional Financial Independence Ratio can be categorized as instructive because the average is 21.36% and it is known that the Central Government is more independent than the Regional Government, (3) PAD Effectiveness Ratio can be categorized as very effective, because the average effectiveness is 109.21%, (4) Revenue Growth Ratio has increased positively with average the average is 4.74%, (5) the Shopping Efficiency Ratio can be categorized as efficient because the realization of the budget is less than the target budget with an average of 88.9%, (6) The Shopping Variance Ratio is categorized as a favorite variance (preferred difference) with an average the average is 44, 8%, (7) Growth Expenditures Ratio experiences positive growth with an average of 6.17%.

Keywords: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya. APBD merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan.

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi

belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Keberhasilan suatu pemerintahan daerah dapat dilihat berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Penekanan pada belanja daerah

menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Kupang merupakan tugas pokok aparat pemerintah daerah terkait yang dituangkan dalam berbagai program strategis. Program-program strategis yang dijalankan, membutuhkan sejumlah dana atau anggaran untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan, berdasarkan kebutuhan dana tersebut pemerintah daerah dapat mengambil keputusan sesuai dengan anggaran pendapatan daerah yang ada. Anggaran pendapatan daerah inilah digunakan untuk membiayai semua program prioritas pemerintah daerah.

Telah banyak penelitian yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan yang dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah (Sinambela dan Ana, 2016; Poyoh et al., 2017; Assidiqi, 2016; Labi, 2019). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kaeng dan Saerang (2015) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tomohon secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100 %, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 44,3%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi Pendapatan dari Desentralisasi menunjukkan rata-rata 2,20% (rendah). Kemandirian Daerah relatif rendah rata-rata 2,51%, Pertumbuhan Belanja relatif positif rata-rata 1,66% Pemerintah Kota Tomohon secara umum dikatakan baik.

Yuliana (2013) dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-rata 10,60% masih berada diantara 0-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD-nya telah dapat ditetapkan dan rasio efisiensi mengalami kenaikan Rasio aktivitas menunjukkan pelaksanaan pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun Rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Penelitian ini akan mencoba mengkaji mengenai kinerja keuangan yang dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja kota Kupang

dari tahun 2015-2018. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja pengelolaan anggaran kota kupang. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Untuk menghitung seberapa besar kinerja pemerintah Kota Kupang, digunakan beberapa analisis rasio yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan Pendapatan untuk melihat kinerja pendapatan pemerintah Kota Kupang, sedangkan analisis rasio Varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja untuk mengukur kinerja belanja pemerintah Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah Daerah Kota Kupang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Kupang dengan mengambil data dari Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Dalam penyusunan penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Kota Kupang tahun 2015-2018.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk menghitung data terdiri dari Rasio kemandirian daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Analisis Varians Belanja dengan metode penelitiannya adalah dari tahun 2015-2018. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, menurut (Umar 2013:42) adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi, buku-buku perpustakaan, laporan keuangan atau data dari perusahaan yang terkait.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :a. Observasi (Supardi, 2006) adalah merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki; b. Wawancara (Sugiyono, 2017) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu dan dengan wawancara, penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi; c. Dokumen dan studi pustaka adalah dokumen yang memuat informasi pengetahuan ilmiah dengan tujuan penciptaannya untuk kegiatan kultural dan pendidikan.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan rasio: a. Rasio Derajat Desentralisasi dihitung dengan Rasio Efisiensi Menurut Mahmudi (2019) Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2019) Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian Keuangan Daerahnya. Rumus untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan , yaitu:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Propinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas PAD Menurut Mahmudi (2019), rasio efektifitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sbb;

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Menurut Mahmudi (2019) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja, anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Rasio pertumbuhan diukur dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{pendapatan Th}(t-1)}{\text{pendapatan Th}(t-1)} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan

anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Rumus Analisis Varians Belanja dapat diuraikan sebagai berikut: Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja.

Rasio Pertumbuhan Belanja menurut Mahmudi (2019) Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui Perkembangan Belanja dari tahun ke tahun. Rasio Pertumbuhan Belanja menggunakan:

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Th}_t - \text{Realisasi Belanja Th}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Th}_{t-1}} \times 100\%$$

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keunagan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisa ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas PAD, rasio derajat desentralisasi, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, dan analisis varians belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Efisiensi Belanja, Varians Belanja dan Pertumbuhan Belanja pada tabel 1 – 7.

Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi. Hasil perhitungan pada tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi dari tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah 15,79% dimana masuk dalam kategori Kurang. Artinya PAD kota Kupang jumlah masih terlalu kecil dari total pendapatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum mampu

membayai pembangunannya dengan Pendapatan Asli Daerah, ini artinya otonomi daerah belum bisa dijalankan secara mandiri. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu,

meningkatkan mutu sumber daya manusia yang yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah serta pengoptimalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari objek wisata.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Kupang TA 2015-2018

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	RDD (%)	Kemampuan Keuangan
2015	145.155.542.156,20	1.020.931.436.935,20	14,2%	Kurang
2016	165.449.023.460,93	1.141.379.963.658,93	14,49%	Kurang
2017	229.137.473.528,55	1.156.105.794.118,85	19,81%	Kurang
2018	171.490.709.096,75	1.169.535.197.600,75	14,66%	Kurang
Rata-rata			15,79%	Kurang

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang TA 2015-2018

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2015	145.155.542.156,20	700.571.560.350,00	20,71	Instruktif
2016	165.449.023.460,93	926.862.260.026,00	17,85	Instruktif
2017	229.137.473.528,55	822.687.901.806,00	27,85	Konsultatif
2018	171.490.709.096,75	901.142.609.179,00	19,03	Instruktif
Rata-rata			21,36	instruktif

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Kupang TA 2016-2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2015	145.155.542.156,20	125.125.330.759,00	116,008%	Sangat Efektif
2016	165.449.023.460,93	144.455.277.759,00	114,53%	Sangat Efektif
2017	229.137.473.528,55	207.804.696.398,00	110,26%	Sangat Efektif
2018	171.490.709.096,75	177.648.571.543,00	96%	Cukup efektif
Rata-rata			109,21%	Sangat Efektif

Tabel 4. Hasil perhitungan Hasil Pertumbuhan Pendapatan Kota Kupang TA 2015-2018

Tahun Anggaran	Realisasi pendapatan Th t-1 (Rp)	Realisasi pendapatan Th t (Rp)	RPB (%)
2015	-	1.020.931.436.935,20	-
2016	1.141.379.963.658,93	1.020.931.436.935,20	11,79
2017	1.156.105.794.118,85	1.141.379.963.658,93	1,29
2018	1.169.535.197.600,75	1.156.105.794.118,85	1,16
Rata-rata			4,74

Tabel 5. Hasil Perhitungan Efisiensi Belanja Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	REB (%)
2015	992.065.739.353,85	1.158.774.432.404,44	85,61
2016	1.173.081.919.042,00	1.322.448.757.640,40	88,70
2017	1.156.827.853.679,43	1.295.479.477.301,63	89,29
2018	1.176.772.138.082,80	1.279.060.055.084,13	92,00
Rata-rata			88,9%

Tabel 6. Hasil Perhitungan Varians Belanja Pemerintah Kota Kupang TA 2015-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Varians (selisih)	(%)
2015	992.065.739,20	1.158.774.432.404,44	(166.708.693.051)	-14,39
2016	1.173.081.919.042,00	1.322.448.757.640,40	(149.366.838.598)	-11,29
2017	1.156.827.853.679,43	1.295.479.477.301,63	(138.651.623.622)	-10,7
2018	1.176.772.138.082,80	1.279.060.055.084,13	(102.287.917.002)	-8
Rata-rata				-44,38

Tabel 7. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Belanja Laporan Realisasi Anggaran TA 2015-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Th t (Rp)	Realisasi Belanja Th t-1 (Rp)	RPB (%)
2015	992.065.739.353,85	-	-

2016	1.173.081.919.042,00	992.065.739.353,85	18,24
2017	1.156.827.853.679,43	1.173.081.919.042,00	-1,38
2018	1.176.772.138.082,80	1.156.827.853.679,43	1,66
	Rata-rata		6,17

Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Kupang terhadap bantuan ekstern (terutama dari bantuan Pemerintah Pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. Pada tahun 2015 masuk dalam kategori instruktif dengan hasil 20,71% , 17,85% pada 2016, pada tahun 2017 hasil rasio kemandirian keuangan daerah sudah naik 27,85% dalam pola hubungan Konsultatif dan pada tahun 2018 turun menjadi 19,03%. Artinya pemerintah kota Kupang masih sangat tergantung dari bantuan Pemerintah Pusat dan provinsi. Kesadaran dan Pasrtisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Kupang sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari Pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas pada Rasio Efektivitas PAD, efktivitas kinerja keuangan Kota Kupang sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2015 sampai 2018 diatas 100% yaitu 109,21%. Artinya pemerintah kota Kupang mencapai target PAD dengan realisasi anggaran PAD. Pemerintah Kota Kupang dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-

sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada tabel 4 diatas, analisis Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedangkan dikatakan kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi 2019). Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Kupang mengalami peningkatan kinerja Keuangan Pendaptan. Hal ini ditunjukkan ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan yang positif yaitu 4,74%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai angka 11,79%, alasan kenaikan pertumbuhan pendapatan disebabkan karena pendapatan asli daerah yang terealisasi melebihi target dengan hasil 114,53% walaupun dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target anggaran , sedangkan yang lainnya terus saja mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 1,29% hal ini terjadi karena dana perimbangan tidak terealisasi dengan baik dan lain-lain PAD yang terelisasi hanya 75,28% berbeda dari tahun 2016 terealisasi mencapai 87,82% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 menjadi 1,16% hal ini disebabkan karena berbeda dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 PAD Kota Kupang tidak mencapai target anggaran hanya mencapai 96,53% untuk dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah juga tidak terelisasi dengan baik walaupun sudah mencapai 98,25% dan 97,93%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2019) bahwa jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang Mempertahankan atau meningkatkan Pendapatan untuk tahun selanjutnya.

Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan tabel 5 diatas, Analisis Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kota Kupang telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2015-2018, namun belum tentu karena bisa saja telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi

belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran karena ada program atau kegiatan yang tidak terlaksana yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran. Diharapkan pemerintah tetap mempertahankan kinerja belanja yang sudah efisien untuk tahun selanjutnya atau menjalankan program selama tahun berjalan agar bisa terealisasi hingga 100%.

Analisis Varians Belanja

Berdasarkan tabel 6 diatas, untuk selisih (varians) belanja kota Kupang pada tahun 2015-2018 yaitu -166.708.693.051, -149.366.838.598, -138.651.623.622, -102.287.917 dengan realisasi bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap untuk tahun 2015 sebesar 85,61%, 2016 sebesar 88,71%, 2017 sebesar 89,30% dan 2018 sebesar 92% dari total LRA. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah, misalnya dibawah 90% justru bisa jadi dinilai kurang baik, karena mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran. Diharapkan mempertahankan atau membuat belanja daerah 100% agar program-program yang belum terserap ditahun sebelumnya bisa terserap sepenuhnya.

Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan tabel 7 diatas, secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Kupang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 6,17%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 18,24%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu -1,38%. Pertumbuhan pendapatan Kota Kupang sudah baik diharapkan Pemerintah mempertahankan kinerja tersebut.

PENUTUP

Derajat desentralisasi Kota Kupang rata-rata berada pada kisaran skala 10,00-20,00, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam upaya menerima pendapatan asli daerah masuk dalam kategori kurang. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong masih sangat rendah dengan rata-rata 21,36%. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD sangat efektif dengan rata-rata 109,21%. Kinerja Keuangan Pendapatan Kota Kupang dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota

Kupang selama tahun 2015-2018 ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan Positif yaitu 4,74%. Kinerja keuangan Belanja Daerah Kota Kupang dilihat dari efisiensi Belanja, realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Kupang nilai rata-ratanya yaitu 88,9%. Kinerja keuangan Belanja Daerah Kota Kupang dilihat dari Varians Belanja Daerah Kota Kupang selama tahun 2015-2018, secara umum dikatakan baik karena tidak melebihi target anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan target rata-rata realisasi Kota Kupang sebesar 44,8%. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang dilihat dari pertumbuhan Belanja daerah kota Kupang selama tahun 2015-2018, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 6,17%.

Disarankan derajat desentralisasi kota Kupang dikisaran pada skala 10,00-20,00, hal ini tergolong rendah. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, pengoptimalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari objek wisata. Berdasarkan tingkat kemandirian daerah Kota Kupang masih tergolong instruktif yang artinya Pemerintah Pusat lebih dominan dari Pemerintah daerah, hendaknya pemerintah Kota Kupang dalam Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerja sama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Berdasarkan Efektivitas PAD kota Kupang tergolong sangat efektif dengan rata-rata 109,21%, yang artinya Efektivitas PAD Kota Kupang sudah baik, walaupun begitu Pemerintah Kota hendaknya terus mempertahankan atau menaikkan lagi Efektivitas PAD Kota Kupang dengan cara meningkatkan kualitas SDM, tenaga pemungut pajak dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan PAD yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM dan tenaga pemungutan pajak dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam pengelolaan PAD kota Kupang. Pertumbuhan

Pendapatan Kota Kupang sudah baik dengan rata-rata 4,17% diharapkan Pemerintah Mempertahankan kinerja yang sudah ada untuk tahun selanjutnya. Efisiensi belanja Kota Kupang sudah baik tidak melebihi anggaran dengan efisiensi rata-rata 88,9%, namun ada indikasi tidak terserapnya program yang tidak berjalan selama tahun berjalan yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja hingga 100%. diharapkan pemerintah menjalankan program yang telah direncanakan selama tahun berjalan agar dapat terserap hingga 100%. Varians belanja Kota Kupang sudah baik dengan selisih rata-rata 44,8% diharapkan pemerintah melakukan kinerja belanja hingga 100% agar program-program yang direncanakan selama tahun berjalan dapat terserap dengan baik. Pertumbuhan belanja Kota Kupang sudah baik diharapkan pemerintah mempertahankan pertumbuhan secara rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi R&D*. Bandung. Alfabeta.

Supandi. (2006). *Metode Penelitian*. Mataram. Yayasan Cerdas Press.

Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yuliana. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja APBD Ditinjau Dari Rasio Keuangan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5).

Kaeng, A. R., & Saerang, D. P. (2015). Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.35794/emba.3.2.2015.9251>.

Labi, A. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1). <https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.234>.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta. YKPN.

Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016).